

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abd. Hadi Saputra¹, Agus Sya'bani Arlan², Munawarah³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: hadipandawa9899@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah pada penelitian ini adalah belum optimalnya pemberian bantuan pelatihan kepada penyandang disabilitas, belum adanya fasilitas khusus terkait pemberdayaan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* dari 12 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas belum baik karena masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Kinerja yang baik adalah dilihat dari aspek tanggung jawab. Adapun aspek yang cukup baik yaitu kemampuan organisasi dan kesesuaian pelayanan dengan kebijakan organisasi. Sedangkan aspek yang belum baik yaitu efektivitas, efisiensi, kepuasan masyarakat, kesesuaian layanan dan mengembangkan program dan layanan. Adapun saran penulis kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial agar dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di desa agar partisipasi penyandang disabilitas bisa meningkat, kepada keluarga penyandang disabilitas agar mendukung penyandang disabilitas untuk mengikuti pemberdayaan disabilitas, dan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pelaporan para penyandang disabilitas agar Dinas Sosial dapat melakukan penanganan yang sesuai terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Kata Kunci: Kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Disabilitas

ABSTRACT

The problem phenomenon in this research is that the provision of training assistance to people with disabilities has not been optimal, there are no special facilities related to empowerment and there is a lack of socialization carried out by the Social Service. The aim of this research is to determine the role of the Social Service in empowering people with disabilities. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques include interview techniques, observation and documentation. The data source was taken through purposive sampling from 12 people. The results of this research show that the performance of the Social Service in Disability Empowerment is not good because there are still several problems found. Good performance is seen from the aspect of responsibility. The aspects that are quite good are organizational capabilities and suitability of services with organizational policies. Meanwhile, the aspects that are not good are effectiveness, efficiency, community satisfaction, suitability of services and developing programs and services. The author's suggestions are for the Head of the Social Rehabilitation Division of the Social Service to carry out comprehensive outreach to the community in the village so that participation of people with disabilities can increase, to families of people with disabilities to support people with disabilities to take part in disability empowerment, and to the community so they can participate in the reporting process for people with disabilities. persons with disabilities so that the Social Service can carry out appropriate treatment for persons with disabilities.

Keywords: Performance, Social Services, Empowerment, Disability

PENDAHULUAN

Saat ini, disabilitas merupakan salah satu masalah yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Disabilitas merupakan kondisi fisik, fungsional, dan/atau kognitif yang menyebabkan individu mengalami kekurangan dan keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan disabilitas merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Riva'i and Budiman (2023), istilah disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melakukan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Tabel Rekapitulasi Data Disabilitas

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	AMUNTAI SELATAN	219
2	AMUNTAI TENGAH	256
3	AMUNTAI UTARA	220
4	BABIRIK	129
5	BANJANG	119
6	DANAU PANGGANG	123
7	HAUR GADING	88
8	PAMINGGIR	44
9	SUNGAI PANDAN	197
10	SUNGAI TABUKAN	53
TOTAL		1448

Sumber : data terpadu sosial banua 2023

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas yaitu: Pertama, dari data yang saya peroleh, ada total 1448 penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan yang mendapatkan bantuan 12 orang. Hal ini disebabkan pengurangan anggaran dari Dinas Sosial sehingga pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas masih belum optimal. Kedua, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas sosial untuk mendorong masyarakat untuk mengikuti program yang akan dilakukan Dinas Sosial. Ketiga, belum adanya fasilitas khusus terkait pemberdayaan seperti fasilitas pelatihan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

METODE

Penelitian ini membahas Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertempat di Jl. Karya Manuntung RT. 5 Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 71419.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menyediakan data tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi(pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Sumber data di ambil melalui pengambilan sampel secara purposive sampling berjumlah 12 orang. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Produktivitas

a. Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam mengukur indikator efektivitas disimpulkan belum baik. Masih kurangnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas sehingga program pemberdayaan disabilitas ini masih belum menjangkau kebanyakan penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada indikator efektivitas disimpulkan belum baik. Dari 1448 orang yang terdata sebagai penyandang disabilitas, hanya 12 orang yang menerima bantuan pemberdayaan. Maka dengan tingginya kasus orang penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menyebabkan belum meratanya pemberian bantuan yang tersalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengukur indikator efektivitas dapat disimpulkan belum baik karena masih tingginya kasus penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyebabkan tidak meratanya pemberian bantuan para penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana ada 1448 orang penyandang disabilitas yang terdata. Namun, hanya 12 orang yang menerima bantuan pemberdayaan pelatihan.

Melihat hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini belum sesuai dengan pendapat teori Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yaitu tujuan efektivitas organisasi pelayanan publik berkaitan dengan rasionalitas teknik, nilai, misi, dan tujuan organisasi serta fungsinya. Dimana Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara belum dapat melakukan pemberdayaan secara efektif sebab target atau sasaran pencapaian belum tercapai yang mana belum terwujudnya pelayanan yang efektif yang mengutamakan kepuasan masyarakat.

b. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengukur indikator efesiensi disimpulkan belum baik. Karena meskipun tidak ada biaya dari program pemberdayaan disabilitas atau gratis, namun untuk fasilitas terkait pemberdayaan disabilitas masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengukur indikator efesiensi disimpulkan belum baik. Karena masih kurangnya anggaran untuk menyalurkan dana bantuan secara merata dan masih kurangnya fasilitas seperti alat bantu disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator efesiensi dapat disimpulkan belum baik. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang menyebabkan

pemberian bantuan masih belum merata serta kurangnya fasilitas khusus untuk pemberdayaan disabilitas.

Hal ini belum sesuai dengan pendapat teori Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yaitu tujuan dari efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik yang mendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasional ekonomis. Sedangkan, pada kenyataannya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum maksimal untuk melakukan penyaluran bantuan secara merata kepada semua penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Kualitas Layanan

a. Kesesuaian Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengukur indikator kesesuaian pelayanan disimpulkan belum baik. Karena beberapa informan tidak lagi mendapat bantuan baik secara tunai ataupun pangan dan tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial pasca pelatihan. Serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial terkait pemberdayaan disabilitas sehingga menyebabkan penyandang disabilitas ataupun keluarganya ragu untuk mengikuti pemberdayaan ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengukur indikator kesesuaian pelayanan disimpulkan belum baik. Karena masih belum meratanya bantuan sosial untuk penyandang disabilitas secara tunai ataupun akses pelatihan, sebab hanya beberapa keluarga yang menerima bantuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kesesuaian pelayanan dapat disimpulkan masih belum baik, karena beberapa keluarga penyandang disabilitas kurang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial sehingga belum meratanya pemberian bantuan pendidikan melalui pelatihan.

Melihat hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini belum sesuai dengan pendapat teori Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yaitu kesesuaian layanan terhadap masyarakat yang dilakukan organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Dalam hal ini, Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum sesuai kebutuhan masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

b. Kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengukur indikator kepuasan masyarakat disimpulkan belum baik. Karena tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial pasca pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi tentang indikator kepuasan masyarakat disimpulkan belum baik. Karena masih belum meratanya bantuan pemberdayaan disabilitas ini kepada semua penyandang disabilitas dan masih belum bisa mandiri penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kepuasan masyarakat dapat disimpulkan masih belum baik, karena belum adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial pasca pelatihan sehingga penyandang disabilitas ini belum bisa mandiri, dan masih belum meratanya bantuan pemberdayaan yang diberikan Dinas Sosial kepada seluruh penyandang disabilitas.

Melihat hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini belum sesuai dengan pendapat teori Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yaitu kepuasan masyarakat dapat dijadikan indikator karena banyak pandangan masyarakat yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena masyarakat merasakan kualitas layanan yang diberikan organisasi publik. Dalam hal ini, masih adanya masyarakat yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terkait penyaluran bantuan dan tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial pasca pelatihan.

3. Responsivitas

a. Kemampuan organisasi

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengukur indikator kemampuan organisasi disimpulkan belum baik. Karena Dinas Sosial belum mengenali sepenuhnya kebutuhan penyandang disabilitas sebab beberapa sudah tidak lagi mendapatkan bantuan tunai ataupun permakanan dan tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial agar penyandang disabilitas bisa mandiri pasca pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi untuk mengukur indikator kemampuan organisasi disimpulkan cukup baik. Dinas Sosial pergi mengunjungi penyandang disabilitas untuk memberikan rujukan kepada penyandang disabilitas tersebut untuk mengikuti pelatihan. Serta memberikan bantuan lain seperti bantuan uang, permakanan atau akses ke layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kemampuan organisasi dapat disimpulkan cukup baik. Karena walaupun beberapa informan dari penyandang disabilitas belum mendapat bantuan tunai ataupun permakanan, Namun, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran. Dalam hal pelayanan untuk mengenali kebutuhan masyarakat terkait penyandang disabilitas sudah dilakukan dengan baik.

Hal ini cukup sesuai dengan penjelasan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) bahwa responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat sudah dikenali dengan cukup baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

b. Mengembangkan program dan layanan

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengukur indikator mengembangkan program dan layanan disimpulkan belum baik. Beberapa informan yang kami wawancarai mengatakan belum cukup baik karena mereka belum merasakan ada peningkatan dari program dan pelayanan yang diberikan Dinas Sosial terkait pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas pasca pelatihan agar penyandang disabilitas tersebut bisa memanfaatkan keterampilan yang diperolehnya dan bisa hidup mandiri dan terjun ke masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi untuk mengukur indikator mengembangkan program dan layanan disimpulkan belum baik. Karena pengembangan program dan layanan terkait pemberdayaan disabilitas, yakni belum adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas pasca pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan dalam mengukur indikator mengembangkan program dan layanan belum baik. Karena pelayanan Dinas Sosial hanya memberikan bantuan permakanan dan belum ada tindak lanjut dari Dinas Sosial pasca pelatihan.

Hal ini belum cukup sesuai dengan penjelasan teori yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yaitu responsivitas menunjukkan pada keselarasan dan pengembangan antara program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum cukup terialisasi dengan baik.

4. Responsibilitas

a. Kesesuaian Pelayanan Dengan Kebijakan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengukur indikator kesesuaian pelayanan dengan kebijakan organisasi disimpulkan cukup baik. Karena Menurut rata-rata informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa pemberdayaan disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial sudah sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hasil observasi untuk mengukur indikator kesesuaian pelayanan dengan kebijakan organisasi disimpulkan cukup baik. Dalam hal pemberdayaan disabilitas Dinas Sosial harus melalui prosedur yang ada, pertama Dinas Sosial akan membuka pendaftaran untuk mengikuti pelatihan di PRSPD (Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas) di Banjar Baru. Hal ini diberitahukan di media sosial ataupun website Dinas Sosial. Setelah penyandang disabilitas melengkapi syarat-syarat pendaftaran dan lulus seleksi, kemudian penyandang disabilitas menunggu untuk diberikan informasi kapan bisa berangkat ke Banjar Baru. Setelah sampai di PRSPD Banjar Baru barulah penyandang disabilitas menerima pelatihan keterampilan selama 6 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan untuk mengukur indikator kesesuaian pelayanan dengan kebijakan organisasi dalam pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Pemberian pelayanan pemberdayaan disabilitas ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yaitu responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam hal ini Dinas Sosial sudah melakukan pemberdayaan disabilitas sesuai prosedur organisasi dan pemberian bantuan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

5. Akuntabilitas

a. Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengukur indikator tanggung jawab disimpulkan sudah baik. Karena Dinas Sosial sudah bertanggung jawab atas fungsi dan tugas yang diberikan, karena tujuan Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas ini agar penyandang disabilitas mendapatkan keterampilan dan bisa hidup mandiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengukur indikator tanggung jawab disimpulkan sudah baik. Karena Dinas Sosial melakukan pemberdayaan sesuai prosedur, tugas dan fungsi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengukur indikator tanggung jawab dapat disimpulkan sudah baik. Karena Dinas Sosial sudah menjalankan

fungsi dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Dan dari dokumentasi yang diperoleh penyandang disabilitas yang menerima pelayanan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Capaian target rehabilitas penyandang disabilitas yang menerima pelayanan dasar adalah jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan tahun 2023 sudah terpenuhi, sehingga dari permohonan yang masuk 100% dapat dilayani.

**Capaian Kinerja SPM Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori indeks pencapaian SPM				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti				
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Jumlah Total Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang harus dilayani:	899	899	0	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 12 Juni 2024

Hal ini sesuai dengan penjelasan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam Kurniaty (2020) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam kegiatan adalah salah satu variabel yang menentukan baik tidaknya kinerja pegawai dalam pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor pendukung
 - a. Sudah optimalnya kerja sama Dinas Sosial Kabupaten dengan Dinas Provinsi terkait pemberdayaan disabilitas
 - b. Dukungan dari keluarga agar penyandang disabilitas mengikuti pelatihan
2. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana
Kurangnya kesadaran dan dukungan dari pihak keluarga dan penyandang disabilitas itu sendiri

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai belum baik, karena masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Indikator yang baik adalah tanggung jawab karena Dinas Sosial sudah melakukan pemberdayaan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan. Indikator yang cukup baik ada 2 (dua). Pertama, kemampuan organisasi cukup baik. Kedua, kesesuaian pelayanan dengan kebijakan organisasi cukup baik karena pemberian pelayanan pemberdayaan ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun indikator yang belum baik meliputi efektivitas, efisiensi, kepuasan masyarakat, kesesuaian layanan dan mengembangkan program dan layanan. Pertama, efektivitas belum baik karena pemberian bantuan belum merata, dari 1448 yang terdata sebagai penyandang disabilitas hanya 12 orang yang menerima bantuan. Kedua, efisiensi belum baik karena kurangnya anggaran yang menyebabkan pemberian bantuan masih belum merata serta kurangnya fasilitas khusus untuk pemberdayaan disabilitas. Ketiga, kesesuaian pelayanan belum baik karena belum meratanya pemberian bantuan dan belum ada tindak lanjut pasca pelatihan. Keempat, kepuasan masyarakat belum baik karena tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial pasca pelatihan sehingga penyandang disabilitas ini belum bisa mandiri, dan masih belum meratanya bantuan pemberdayaan yang diberikan Dinas Sosial kepada seluruh penyandang disabilitas. Kelima, mengembangkan program dan layanan belum baik karena belum adanya pengembangan program terkait pemberdayaan disabilitas.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat meliputi kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya kesadaran dan dukungan dari pihak keluarga dan penyandang disabilitas itu sendiri, yang mana dua faktor ini cukup menghambat kinerja Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menapai tujuan yang diharapkan. Adapun faktor pendorong kinerja Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi sudah optimalnya kerja sama Dinas Sosial Kabupaten dengan Dinas Provinsi terkait pemberdayaan disabilitas dan dukungan dari keluarga agar penyandang disabilitas mengikuti pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Rawat Jalan Pada Puskesmas Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong'.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anonim (2018) *PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGASL DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA*.
- Anonim (2021) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas*.
- Ansfridho, A.X. and Setyawan, D. (2019) 'Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi

Penyandang Disabilitas’, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, viii(2).

Anshari, M.R. (2023) ‘ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Cross-border*, 6(1), pp. 28–41.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administratus*, 7(2), pp. 38–53.

Asnawi (2019) ‘Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas Studi Kasus Atas Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Karakteristik Pekerjaan’, pp. 1–63.

Febriadi, H. (2022) ‘KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 34–41.

Hartati, A. and Fanggidae (2020) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi, Media Sains Indonesia*.

Hayati, S. and Surya, M.A. (2020) ‘Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai’, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2). Available at: <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>.

Hidayatullah, G.M. (2024) ‘PENERAPAN PELAYANAN PRIMA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1219–1229.

Khaeruman (no date) *Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep & Studi Kasus) i Meningkatkan Kinerja MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*.

Kurniaty, H. (2020) ‘Pengaruh Stres Lingkungan Kerja, Stres Kerja Organisasi Dan Stres Kerja Pribadi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan’, *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), pp. 70–81. Available at: <https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1780>.

Lette, K.Y. (2021) ‘Kinerja Dinas Sosial Kota Kupang Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2018’.

Muhammad Hidayatullah, G. (2021) ‘Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 213–223. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384>.

Noorrahman, M.F., Rizal, M. and Sairin, M. (2022) ‘Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kinerja dalam Aspek Kepuasan Kerja pada Pejabat Struktural Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), pp. 155–163.

Noorrahman, M.F. and Sairin, M. (2023) ‘ANALISIS KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5475–5481.

Panjaitan M. dkk (2023) *Manajemen Kinerja (Perspektif Balanced Scorecard)*.

Pasolong, H. (2017) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Paulina, S. (2021) ‘KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN PADA MASA PANDEMI COVID 19’, *Al’iidara Balad*, 3(2), pp. 27–39.

Paulina, S. (2023) ‘PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN SELATAN

KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5431–5439.

Rifani, J. and Febriadi, H. (2021) 'KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN PADA PLASA TELKOM AMUNTAI AREA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *INOVATIF*, 3(1).

Riva'i, I.J. and Budiman, H. (2023) 'Sosialisasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kuningan', *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), pp. 18–24. Available at: <https://doi.org/10.61227/inisiatif.v2i1.110>.

Setiawan, I. (2022) 'ANALISIS PELAYANAN IGD DALAM MERAWAT PASIEN SUSPECT CORONA VIRUS DI BLUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI', *Al Iidara Balad*, 4(1), pp. 41–48.

Setiawan, I. and Zannah, R. (2022) 'PELAYANAN REHABILITASI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 22–27.

Sinaga, O.S. *et al.* (2020) 'Manajemen Kinerja dalam Organisasi - - Google Books', *Yayasan kita menulis*.

Sinambela, L.P. dan S.S. (2019) *Manajemen kinerja : pengelolaan, pengukuran, dan implikasi kinerja*. Medan: Raja Grafindo Persada.

STIA AMUNTAI (2022) *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik*.

Tun, H. (2016) 'Kinerja Pegawai Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja', *Media Nusa Creative* [Preprint].

Urahmah, N. and Andri, A. (2023) 'KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KERJA IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3233–3241.

Usman, J. *et al.* (2022) 'Kinerja dinas sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat di desa marannu kecamatan lau kabupaten maros'.